

Dinamika Nahdlatul Ulama Cabang Blambangan Pada Tahun 1944-1966

The Dynamics of Nahdlatul Ulama Blambangan Branch In The Year 1944-1966

Muhammad Wahyudi¹ ✉, Fara Sari Nur Bayani², Akhmad Ryan Pratama³, Kayan Swastika⁴

¹ International Islamic University of Islamabad, Pakistan

^{2,3,4} Universitas Jember

✉ muhammad.phdap508@iiu.edu.pk/

Article history:
Submitted: 22 Oktober 2022
Accepted: 16 Desember 2022
Published: 20 Desember 2022

Abstract: *Nahdlatul Ulama Blambangan Branch was founded in 1944. The formation of Blambangan Branch was not triggered by conflict as is often the case in other organizations. The establishment of the branch was carried out to maximize the reach of NU in all corners of the vast Banyuwangi Regency area. This reason was also corroborated by the PBNU statement which stated that the existence of the two branches was carried out to improve the performance of NU cadres. With qualitative methods, this research concluded that the establishment of the NU Blambangan Branch was motivated by two things: First, the Banyuwangi Branch NU, which had been established since February 2, 1930, was considered to be still too busy in the northern region. Whereas in the southern part of the region there are many madrasas and Islamic boarding schools. Second, the desire to accelerate the development of NU in Banyuwangi, which incidentally is the largest district in East Java. The areas that are members of the Blambangan branch of NU are the districts of Srono, Cluring, Genteng, Gambiran, Tegaldlimo, Bangorejo, Pesanggaran. The 1955 general election in Banyuwangi became a proving ground for NU in the political arena. NU Banyuwangi managed to get the most votes in the 1955 election, which was 160,989 votes. This proves that NU carries out its political communication intensely. During the tumultuous 1950-1965 period, NU focused on politics by using cultural media, they were also active in stemming nationalist and communist voices.*

Keywords: *Blambangan Branch; Dynamics; Nahdlatul Ulama; Political.*

Abstrak: Nahdlatul Ulama Cabang Blambangan didirikan pada tahun 1944. Pembentukan Cabang Blambangan tidak dipicu oleh konflik seperti yang sering terjadi di organisasi lain. Pendirian cabang tersebut dilakukan untuk memaksimalkan jangkauan NU di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Banyuwangi yang luas. Alasan ini juga dikuatkan oleh pernyataan PBNU yang menyebutkan keberadaan dua cabang tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja kader-kader NU. Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pendirian NU Cabang Blambangan dilatarbelakangi oleh dua hal: Pertama, NU Cabang Banyuwangi yang sudah berdiri sejak 2 Februari 1930 dinilai masih terlalu berkutat di wilayah bagian utara. Padahal di wilayah bagian selatan banyak berdiri madrasah dan pesantren. Kedua, keinginan untuk mempercepat perkembangan NU di Banyuwangi yang notabene merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur. Daerah-daerah yang tergabung dalam NU cabang Blambangan adalah kecamatan Srono, Cluring, Genteng, Gambiran, Tegaldlimo, Bangorejo, Pesanggaran. Pemilihan umum tahun 1955 di Banyuwangi menjadi ajang pembuktian bagi NU dalam pentas politik. NU Banyuwangi berhasil mendapatkan suara terbanyak pada pemilu tahun 1955 yaitu 160.989 suara. Hal ini membuktikan bahwasanya NU menjalankan komunikasi politiknya secara intens. Pada masa kekaduan 1950-1965, NU fokus berpolitik dengan menggunakan media budaya, mereka juga aktif membendung suara-suara nasionalis dan komunis.

Kata Kunci: Dinamika; Cabang Blambangan; Nahdlatul Ulama; Politik.

P-ISSN 2798-196X E-ISSN 2798-3110 © 2022 author(s)

Published by UIN Raden Mas Said Surakarta, this is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.

DOI: 10.22515/isnad.v3i2.5638

Pendahuluan

Berakhirnya masa penjajahan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menuntut para pemimpin bangsa bekerja keras untuk menata dan memberikan wajah baru bagi Republik ini. Isu yang paling asasi ialah menetapkan Dasar Negara. Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia melalui para pemimpin berupaya konsisten terhadap identitas mereka dengan memperjuangkan agar nilai-nilai Islam termaktub dalam konstitusi negara. Berawal dari perjuangan gigih dalam panitia sembilan yang diketuai oleh Soekarno dengan melahirkan “Piagam Jakarta” yang di tandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Isu ini mencapai klimaksnya dalam perdebatan di Majelis Konstituante hasil pemilu I tahun 1955. Inilah yang tentunya dapat dianggap sebagai diskripsi fakta sejarah bangsa Indonesia khususnya umat Islam, yang membentuk trend politik Islam yang terus berkembang dalam perjalanan sejarah perpolitikan bangsa Indonesia sampai dewasa ini.¹

Banyuwangi pada abad XX mulai mengalami kondisi perubahan yang cukup signifikan. Berbagai pembangunan terutama di bidang transportasi darat maupun laut mulai digalakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pelabuhan Boom yang sejak lama menjadi satu-satunya akses ke Banyuwangi mulai ditingkatkan. Tak hanya itu, pembangunan juga digalakan untuk rel kereta api yang mampu menembus pegunungan di barat Banyuwangi. Pembangunan rel ini ahirnya membuka jalan yang selama berabad-abad tidak pernah ada. Begitu pula jalur darat yang mulai dirintis dengan memotong gunung Gunitir di sisi selatan dan menembus lebatnya hutan Baluran di sisi utara.

Perkembangan infrastruktur Banyuwangi yang pesat tak hanya memicu pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengubah lanscape sosial di tengah masyarakat, terutama dalam kehidupan sosial keagamaan. Fenomena ini ditandai dengan masuknya para penganut Wahabi awal tahun 1900-an yang mulai “mengusik” kehidupan beragama di Banyuwangi yang kala itu didominasi oleh penganut Islam *Ahlusunnah wal Jama’ah*.² Wahabi adalah gerakan yang dipimpin oleh kelompok juru dakwah Muhammad Ibnu Abdul Wahab, saat melihat aktivitas keagamaan umat Islam pengikut empat Madzab di Arab tidak sesuai dengan aktivitas nabi Muhammad dan para sahabat pada jamanya. Oleh karena itu gerakan ini dengan misi pemurnian Islam bermaksud mengajak umat Islam kembali ke jaman nabi Muhammad.³

Sebelum hadirnya Nahdlatul Ulama (NU), di Banyuwangi terdapat dua organisasi yang hadir yaitu yang pertama Al- Irsyad di Lateng Banyuwangi. Menurut Notonegoro organisasi ini merupakan organisasi yang mewadahi keturunan Arab di Nusantara yang didirikan oleh Syekh Ahmad Syoorkanty. Namun, dapat dipastikan bahwa Al-Irsyad sudah ada sebelum tahun 1927. Karena keberadaan Al-Irsyad sudah dibuktikan dengan mendirikan sekolah (kini menjadi SD dan SMP Al-Irsyad) yang berada di Jl Besuki Rahmad No 79 Singotrunan, Banyuwangi. Pada saat itu,

¹ Qisthi Faradina Ilma Mahanani et al., “ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA (Perspektif Sejarah),” *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 3, no. 1 (2022), hlm. 62–69.

² Notonegoro, *Manunggaling NU Ujung Timur Jawa*. (Banyuwangi: Batari Pustaka, 2021), hlm. 11-13.

³ Muzadi, *NU Dalam Prespektif Sejarah dan Ajaran*. (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 58.

Al-Irsyad melancarkan “serangan” terhadap paham, ajaran dan praktek tradisi keagamaan dari kalangan pesantren yang berada di Banyuwangi.

Organisasi Islam kedua adalah Muhammadiyah. Masuknya organisasi Muhammadiyah ke Banyuwangi diperkirakan pada tahun 1922. Muhammadiyah menganggap bahwa kalangan pesantren yang termasuk masyarakat yang masih melestarikan islam dengan unsur-unsur “bid’ah” tersebut menjadi salah satu tujuan untuk dimurnikan. Tuduhan Muhammadiyah tersebut kemudian membuat keresahan kiai-kiai di Banyuwangi, karena khawatir terhadap perkembangan paham modernis tersebut yang dianggap menyudutkan kalangan pesantren. Akhirnya untuk menyelamatkan tuduhan-tuduhan dari Muhammadiyah kemudian mereka bergabung di NU.⁴ Pilihan menjatuhkan diri ke NU, disebabkan karena mereka masih mengizinkan kegiatan-kegiatan yang dekat dengan ritual-ritual kebudayaan. Salah satunya seperti, ziarah kubur, tahlilan dan perayaan maulid nabi. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh para kiai dan masyarakat di lingkungan pesantren.

Pada tahun 1930-an, NU belum begitu populer di masyarakat Banyuwangi. Namun, bukan berarti NU itu tidak diterima di dalam masyarakat. Perkembangan pendidikan dan ajaran agama juga dikembangkan oleh NU Banyuwangi. Bahkan kegiatan-kegiatan rapat umum yang terlaksana di Banyuwangi.⁵ Untuk menyebarkan agama islam dalam bidang pendidikan NU juga mendirikan gedung permanen yaitu Madrasah Al-khairiyah pada tahun 1930. Madrasah ini berada di Jalan Kapten Ilyas, Banyuwangi. Sebelumnya Madrasah ini tidak memiliki tempat yang masih melakukan kegiatannya secara berpindah-pindah tempat. Hingga saat ini madrasah ini masih berdiri dan melakukan aktivitas kependidikannya.

Untuk memudahkan koordinasi, NU kemudian membentuk majelis-majelis yang memiliki visi misi yang sama, yaitu untuk memberikan pendidikan keaswajaan. Majelis tersebut terdapat banyak kegiatan rutin yang dilaksanakan, contohnya rapat umum yang dikenal dengan nama Nasihin. Selain mengajarkan keagamaan, majelis ini juga bertujuan untuk memperkenalkan NU pada khalayak luas. Selain Nasihin, ada pengajian yang diberi nama Nahdlatul Islamiyah. Nahdlatul Islamiyah merupakan pengajian umum yang diselenggarakan di Masjid Jami’ Banyuwangi (kini dikenal dengan nama Masjid Agung Baiturrahman). Tujuan dari Nahdlatul Islamiyah adalah untuk memperkuat ajaran aswaja. Acara ini dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai daerah, tidak hanya Banyuwangi, tetapi ada juga dari Bali.⁶

NU telah berdiri sejak 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H. Namun, tidak serta merta Cabang NU di berbagai daerah. Cabang NU yang pertama kali didirikan adalah NU Cabang Jombang pada tahun 1928. Pada Mukhtamar ketiga NU tanggal 28-29 September 1928 dilaporkan telah ada 35 Cabang yang berdiri di Jawa dan Madura. Hasil dari Mukhtamar tersebut adalah membentuk Lajnatun Nasihin. Lajnatun Nasihin adalah komisi yang melakukan pengembangan NU dengan mendirikan Cabang NU di seluruh Indonesia. Tim khusus ini terdapat tokoh yang paling sering berkeliling Nusantara untuk mendirikan NU tak kecuali di Banyuwangi yaitu KH. Abdul Wahab.

⁴ Tim PCNU Banyuwangi. *Sejarah Nahdlatul Ulama Banyuwangi*. Banyuwangi (PCNU, 2016), hlm. 74.

⁵ Tim PCNU Banyuwangi. *Sejarah Nahdlatul Ulama Banyuwangi*. Banyuwangi (PCNU, 2016), hlm. 79-80.

⁶ Notonegoro. *Manunggaling NU Ujung Timur Jawa*. (Banyuwangi: Batari Pustaka, 2021), hlm. 18.

Pertemuan Nahdlatul Islamiyah pada 16 Januari 1930, KH. Abdul Wahab mengusulkan kepada pengurus Nahdlatul Islamiyah untuk menjadi Cabang NU di Banyuwangi.

Usulan KH. Abdul Wahab tersebut langsung ditindaklanjuti dengan diadakan rapat pengurus Nahdlatul Islamiyah beserta para ulama di Banyuwangi. Pada 16 Januari 1930 di kediaman Kiai Maksun yang berada di kampung Kemasan, Kelurahan Panderejo. Dari rapat ini disepakati bahwasanya Nahdlatul Islamiyah ini resmi menjadi Cabang NU di Banyuwangi. Pertemuan tersebut tidak hanya meresmikan didirikannya Cabang NU Banyuwangi, namun juga membentuk susunan kepengurusannya. NU di Banyuwangi secara formal kelembangaan mulai berkembang. Pada tanggal 21-24 April 1934, Banyuwangi ditunjuk sebagai tuan rumah Mukhtamar ke IX NU.⁷

Perkembangan NU di Banyuwangi terkendala ketika masa pendudukan Jepang. Awalnya kedatangan tentara Jepang ini disambut baik oleh orang-orang bumi putra dan semua pemimpin keagamaan. Namun, sikap bangsa Indonesia ini berubah ketika mengetahui Jepang tidak lebih baik dari Belanda. Aktivitas organisasi sosial maupun politik dilarang dalam bentuk apapun. Kegiatan tersebut harus lapor terlebih dahulu baru boleh dilakukan. Namun, jika tidak melapor dahulu maka itu berarti membengkokkan dan hukuman berat dijatuhkan. Keputusan semacam inilah yang membunuh aktivitas organisasi sosial, politik, maupun keagamaan.

Kebijakan tentara Jepang tersebut juga terjadi di Banyuwangi. NU dan juga organisasi agama lainnya dipaksa untuk vakum sementara waktu, dan tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti halnya pengajian umum. Selain itu, lembaga pendidikan seperti madrasah ditutup oleh pemerintahan Jepang. Beberapa madrasah yang mengalami penutupan antara lain Madrasah Darul Faizin, Grogol, Giri. Selanjutnya ada madrasah Al-Fatah di Sragen, Madrasah Nahdlatul Thullab di Kepundungan Srono,⁸ Madrasah Tarbiyatus Syibyan di Singonegaran Banyuwangi, dan beberapa madrasah lainnya yang mengalami penutupan di masa Jepang.⁹

Tindakan semena-mena Jepang yang di luar bayangan membuat orang-orang bumi putra, terutama warga Nahdliyin merasa terpukul. Pada bulan April 1942, sekitar dua bulan setelah menguasai Jawa, KH. Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar NU dan KH. Mahfudz Shiddiq selaku ketua *Hoofdbestuur* (pengurus besar) NU ditangkap dan dipenjarakan selama empat bulan. Alasannya adalah kedua tokoh tersebut dituduh sebagai dalang dari aksi perusakan pabrik gula di dekat pesantren Tebuireng. Sejatinya alasan tersebut hanya dibuat oleh tentara Jepang, Alasan dua tokoh ini menolak *Saikerei*, yaitu upacara penghormatan kepada kaisar Jepang Tenno Haika.

Peristiwa ini cukup menggemparkan dunia pesantren dan meresahkan warga NU. Kejadian ini langsung direspon oleh para pembesar NU dengan melakukan pertemuan para Konsul NU di Jakarta pada awal Agustus 1942. Dalam permusyawaratan tersebut membahas tentang bagaimana cara melepaskan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Mahfud Siddiq, dan Kiai-kiai lain yang ditangkap oleh Jepang. Pertemuan tersebut para Konsul NU memutuskan untuk bekerja lebih kepada pemerintahan Jepang dalam menyempurnakan masyarakat Jawa sebagai "Benteng Perjuangan Jawa". Keputusan tersebut seolah mendukung pemerintahan tentara Jepang, tak lain hanyalah sandiwara demi

⁷ Notonegoro. *Manunggaling NU Ujung Timur Jawa*. (Banyuwangi: Batari Pustaka, 2021), hlm. 21.

⁸ Wafiruddin. *Biografi KH. Dimiyati Asy Syafi'i : Kyai Muda Sang Pejuang Kemerdekaan* (Banyuwangi, 2010), hlm. 24.

⁹ Notonegoro. *Manunggaling NU Ujung Timur Jawa*. (Banyuwangi: Batari Pustaka, 2021), hlm. 26.

memuluskan strategi. Tiap usaha dikatakan untuk kemenangan Asia Timur Raya yang menjadi propropaganda Jepang.

Pada 18 Agustus 1942 KH. Hasyim Asy'ari dan beberapa kiai lain yang ditangkap oleh tentara Jepang akhirnya dibebaskan. Selain itu, Jepang juga mengubah haluan politiknya. Masuknya Jepang ke Jawa adalah mengontrol warga, melarang segala aktivitas politik. Ketika mereka merasa prioritasnya tercapai mereka mengalihkan prioritas mereka untuk masyarakat Jawa guna mempertahankan kekuasaan terhadap ancaman sekutu. Oleh karena itu, Jepang perlu melakukan pendekatan kepada para kiai yang memiliki jejaring yang luas serta sangat dihormati oleh mayoritas masyarakat pedesaan. Pada tahun 1943, Jepang mengakui kembali aktivitas NU dan Muhammadiyah. Tidak hanya di Pusat, tetapi juga di berbagai daerah, tak terkecuali di Banyuwangi.

Seiring dengan kelonggaran yang diberikan oleh Jepang pada 1944, NU di Banyuwangi kembali bersemangat. Semangat baru tersebut ditandai dengan pemekaran kepengurusan. Dalam cengkraman pendudukan Jepang, terdapat musyawarah yang kemudian memutuskan berdirinya NU Cabang Blambangan. Akhirnya NU di Banyuwangi terdapat dua Cabang, yaitu Cabang Banyuwangi dan Cabang Blambangan. Pada akhirnya pendirian Cabang NU diperbolehkan didirikan menjadi dua cabang di dalam satu Kabupaten. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Partai Nahdlatul Ulama disahkan pada 1 Oktober 1960.

Dengan landasan organisasi yang demikian, maka lahirlah dua kepengurusan Cabang NU di Banyuwangi. Selain NU Cabang Banyuwangi sendiri yang telah berdiri sejak 1930, juga dibentuk Cabang NU Blambangan pada 1944. Terbentuknya Cabang Blambangan ini terjadi bukan karena dipicu konflik sebagaimana yang sering terjadi di organisasi lainnya. Pendirian Cabang tersebut dilakukan untuk memaksimalkan jangkauan NU di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Banyuwangi yang luas. Alasan ini juga dikuatkan oleh pernyataan PBNU yang menyebutkan keberadaan dua cabang tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja kader-kader NU.

Pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, NU di Banyuwangi juga ikut andil besar dalam perjuangan fisik yang berpuncak pada meletusnya Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Bentuk sumbangsih fisik untuk merebut kemerdekaan adalah santri-santri di Banyuwangi wajib masuk ke Hizbullah. Setelah Revolusi selesai dan Indonesia mendapatkan kedaulatannya lagi keterlibatan NU secara organisatoris dalam pentas politik semakin maksimal dan dimulai pada tahun 1952.

Pemilihan umum tahun 1955 di Banyuwangi menjadi ajang pembuktian bagi NU dalam pentas politik. NU Banyuwangi berhasil mendapatkan suara terbanyak pada pemilu tahun 1955 yaitu 160.989 suara. Hal ini membuktikan bahwasanya NU menjalankan komunikasi politiknya secara intens. Pada periode 1944-1945 NU juga memiliki peranan, tahun 1944 NU berfokus pada peranan politik. Bagaimana mereka bertahan dalam gempuran di pendudukan Jepang. Pada tahun 1945-1949 NU juga memiliki peranan dalam menjaga atau mempertahankan kemerdekaan. Di masa tenang tahun 1950-1965 NU fokus terjun dalam politik dengan menggunakan media kebudayaan mereka juga aktif membendung suara dari nasionalis dan komunis.

Metode

Dalam melakukan suatu penelitian, maka diperlukan adanya suatu metode yang dalam hal ini berfungsi sebagai langkah-langkah atau suatu cara yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan penelitian tersebut. Bagian metode ini menjadi bagian yang sangat penting, karena metode ini menjadi tahapan untuk peneliti dapat menemukan dan juga menganalisis suatu peristiwa penting yang kemudian akan diteliti dan selanjutnya akan menemukan suatu permasalahan beserta langkah pemecahannya. Penelitian yang membahas terkait dengan “Dinamika Nahdlatul Ulama Cabang Blambangan Tahun 1944-1966” ini menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang ditulis oleh Kuntowijoyo. Menurut Kuntowijoyo Dalam melakukan penelitian sejarah, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dan diperhatikan, yaitu meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.¹⁰

Langkah yang pertama yaitu pemilihan topik, dalam pemilihan topik ini diharapkan dapat memilih topik yang “*workable*” maksudnya yaitu dapat dikerjakan dengan tepat waktu. Pemilihan topik pada penelitian ini sudah terdapat beberapa faktor pendukung untuk menyelesaikan penelitian. Setelah menentukan topik penelitian, peneliti disini perlu melakukan studi literatur dengan cara penelusuran sumber-sumber tertulis seperti arsip, artikel jurnal, laporan penelitian berupa skripsi, tesis dan disertasi yang didalamnya memuat data mengenai Dinamika Nahdlatul Ulama Cabang Blambangan pada tahun 1944-1966.

Langkah yang kedua yaitu tahap pengumpulan sumber/heuristik, dimana dalam tahap ini sumber yang dikumpulkan tentunya harus sesuai dengan jenis sejarah yang ditulis. Sumber menurut bahanya terdapat dua hal, yaitu tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan artifact. Pada langkah ini penulis dapat menemukan sumber-sumber buku dan sumber lisan yang kemungkinan dapat dijadikan sebagai sumber primer. Buku yang didapat oleh peneliti adalah buku yang berjudul Sejarah Nahdlatul Ulama Banyuwangi. Peneliti menemukan catatan KH. Achyad Arsyad, dalam catatan tersebut menjelaskan tentang berdirinya NU Cabang Blambangan. Selain itu peneliti juga menemukan foto kegiatan KH. Achyad Arsyad dengan presiden Sukarno, koran tentang pemilu tahun 1955 di Banyuwangi, koran tentang pemecatan 5 bupati yang didalamnya terdapat bupati Banyuwangi, koran tentang pembentukan badan komando siaga Banyuwangi, koran tentang Lesbumi Genteng menghibur JON 515, foto KH. Dimiyati dan foto Stempel NU Cabang Blambangan.

Langkah yang ketiga yaitu verifikasi atau kritik dan sumber. Verifikasi dilakukan tujuannya adalah untuk dapat mengetahui keabsahan sumber. Kritik sumber dalam hal ini memiliki dua macam, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Sumber yang didapatkan di seleksi berdasarkan keautentisitas dan kredibilitas. Sumber yang didapatkan oleh peneliti terkait dengan autentisitasnya. Peneliti mendapatkan dokumen dan buku yang terdapat perbedaan, yaitu dokumen tentang berdirinya NU Cabang Blambangan dengan buku Manunggaling NU Ujung Timur Jawa. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwasanya kecamatan yang bergabung di NU

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 90.

Blambangan ada 8 kecamatan, sedangkan di dalam buku tersebut di jelaskan 7 kecamatan yang bergabung di NU Cabang Blambangan.

Langkah yang keempat yaitu interpretasi atau suatu penafsiran. Dimana dalam tahap interpretasi ini yaitu merangkai fakta sejarah yang terdapat di beberapa sumber dan informasi yang ditemukan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, maka peneliti dapat menyusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Penulis menyusun fakta-fakta sejarah yang berhubungan dengan Dinamika Nahdlatul Ulama Cabang Blambangan pada tahun 1944-1966. Langkah yang kelima yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Dalam tahapan terakhir ini peneliti memaparkan hasil penelitaian yang telah ditemukan dari beberapa hasil penelitian yang sudah ditemukan dari beberapa sumber tulisan. Dalam menuliskan laporan ini, peneliti tidak lepas dari sumber-sumber yang telah peneliti dapatkan. Dalam historiografi ini berisikan mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca.

Pembahasan

Asal Mula Berdirinya Nahdlatul Ulama Cabang Blambangan

Pada tahun 1944 Jepang memberikan kelonggaran terhadap aktivitas keagamaan maupun sosial. Kelonggaran yang diberikan oleh Jepang ini membuat NU di Banyuwangi kembali bersemangat. Semangat baru ini ditandai dengan upaya pemekaran kepengurusan Cabang NU tidak hanya di Banyuwangi saja, namun juga Cabang NU Blambangan. Dilibatkannya Kiai Dimiyati di dalam tubuh organisasi NU memberikan pengaruh positif kala itu, karena kiai-kiai kampung saat itu ragu untuk bergabung dengan NU berangsur-angsur turut masuk menjadi bagian dalam NU. Selain Kiai Dimiyati, terdapat Kiai Ahyat Arsyad yang mampu merangkul kalangan elit tradisional lokal dalam pengembangan NU di Banyuwangi. Pasca kesuksesan menambah anggota NU di skala Desa dan Kecamatan, Kiai Ahyat Arsyad kemudian mengadakan deklarasi NU Cabang Blambangan yang bertepatan di Srono.

Catatan stensil KH. Achyat Irsyad yaitu ketua Tanfidiziyah NU Blambangan menjelaskan bahwasanya NU Blambangan didirikan tahun 1944 yang berpusat di Srono. Lebih tepatnya pada hari Kamis pahing tanggal 25 Sawal 1363/12 Oktober 1944. Terdapat tiga daerah kawadenan atau tujuh kecamatan yang bergabung dalam NU Cabang Blambangan yaitu Srono, Genteng, Gambiran, Tegaldlimo, Pesanggaran, Bangorejo, dan Cluring. Pelantikan pengurus Cabang dilangsungkan di Madrasah Nahdlatut Thullab, Kepundungan, Srono, yang dihadiri oleh PBNU yaitu KH. Abdul Wahab Chasbullah. Daerah yang bergabung dalam NU Cabang Banyuwangi adalah Rogojampi, Kabat, Banyuwangi, Glagah, Giri, Singojuruh serta Kalibaru. Kecamatan yang lain seperti Songgon, Muncar, Siliragung, Glenmore, Licin, Siliragung, Kalipuro, dan Wongsorejo baru lahir setelah masa itu dengan rentang waktu yang berbeda-beda.

Keikutsertaan Kalibaru ke Cabang Banyuwangi karena mudahnya akses transportasi menuju pusat Cabang Banyuwangi. Saat itu akses untuk ke Banyuwangi kota dari Kalibaru yang berada di sisi barat-selatan ditempuh dengan menggunakan transportasi kereta api. Alasan kecamatan Kalibaru tidak bergabung dengan Cabang Blambangan dikarenakan akses jalan menuju Srono

masih susah. Sehingga Kecamatan Kalibaru lebih memilih bergabung dengan Cabang Banyuwangi dengan alasan akses yang mudah.¹¹

Pendirian NU Cabang Blambangan dilatarbelakangi oleh dua hal: Pertama, NU Cabang Banyuwangi yang sudah berdiri sejak 2 Februari 1930 dinilai masih terlalu berkecukupan di wilayah bagian utara. Padahal di wilayah bagian selatan banyak berdiri madrasah dan pesantren. Kedua, keinginan untuk mempercepat perkembangan NU di Banyuwangi yang notabene merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur. Keberadaan Cabang Blambangan ini bukan semata adanya pemekaran yang dipicu konflik sebagaimana sering disalahpahami oleh orang-orang Banyuwangi sendiri. Pemekaran tersebut untuk memaksimalkan daya jangkauan NU di semua pelosok Banyuwangi yang cukup luas.

Ketua Rais Syuriah Cabang Blambangan adalah KH. Dimiyati sedangkan Ketua Tanfidziyah adalah KH. Achyat Arsyad. KH. Dimiyati selaku Rais Syuriah NU Blambangan, sangat aktif di kepengurusan NU dan juga aktif memenuhi rapat di ranting-ranting. Dalam catatan stensil KH. Achyat Arsyad di ceritakan bahwasanya KH. Dimiyati ini ketika menghadiri undangan rapat di ranting-ranting sering tengah malam pulang dari rapat dengan kendaraan sepeda di jalan kehujanan. Keaktifan tersebut bermula saat menjadi Rais Syuriah Ranting NU Kebaman. Aktifnya KH. Dimiyati mengakibatkan perkembangan NU di sisi Selatan Kabupaten Banyuwangi mulai terlihat. Beberapa kiai mulai aktif di kepengurusan NU seperti halnya KH. Abbas Tugung, KH. Askandar Sumberberas, KH. Djunaidi Genteng dan kiai-kiai lainnya yang ikut terlibat dalam kepengurusan NU.¹²

Laporan sumbangan Mukhtamar NU ke 22 yang di adakan di Jakarta pada tahun 1959 menjelaskan bahwasanya NU Cabang Blambangan juga ikut berkontribusi dalam memberikan sumbangannya. Sumbangan tersebut berupa 150 kg beras, uang sebesar Rp. 3000 rupiah. Hal ini terlihat bahwasanya NU Cabang Blambangan pada waktu itu sangat berkembang dengan pesat. Dilihat dari berdirinya cabang tersebut belum lama namun sudah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar. Dalam laporan tersebut dapat dilihat bahwasanya NU Blambangan menduduki urutan ke 3 yang memberikan sumbangan terbanyak setelah NU Cabang Banyuwangi dan NU cabang Sidoarjo yang sudah berdiri sejak lama sebelum NU Cabang Blambangan.¹³

Prestasi yang juga patut dicatat dari Cabang Blambangan adalah upayanya dalam menambah aset-aset NU. Laporan pada tahun 1962 menjelaskan NU Blambangan ini mampu membeli sebidang tanah yang dipergunakan untuk kantor NU dan sejumlah lembaga dan badan otonom. Tanah tersebut berhasil dibeli atas iuran 17 orang yang masing-masing orang tersebut iuran sebesar Rp 1000 dan seorang dermawan menyumbangkan sebesar Rp 10.000. Namun tanah tersebut kini sudah menjadi kompleks Masjid Besar Al-Mutaqqin Srono dan sejumlah sekolah yang berada di area tersebut.

¹¹ Notonegoro. *Manunggaling NU Ujung Timur Jawa* (Banyuwangi: Batari Pustaka, 2021), hlm. 30

¹² As'adi. *Biografi KH. Dimiyati As-syafi'i: Kyai Muda Sang Pejuang Kemerdekaan* (Banyuwangi: PP. Nahdlatut Thullab, 2010), hlm. 33-34

¹³ Laporan Sumbangan Mukhtamar NU ke 22 Tahun 1959.

Dinamika Kiprah Nahdlatul Ulama Cabang Blambangan Dalam Bidang Politik tahun 1950-1966

Penarikan diri NU dan Masyumi merupakan guncangan terbesar dalam perjalanan politik Islam pada awal 1950-an. Masyumi didirikan atas dasar prinsip bahwa umat Islam Indonesia seharusnya menyatukan aspirasi politiknya serta melaksanakan perjuangan melalui partai tunggal. Penarikan diri NU pada 1952 bukan perpecahan pertama yang dialami oleh Masyumi, sebelumnya Partai Serikat Islam (PSII), Serekat Islam (SI) juga meninggalkan Masyumi pada tahun 1947. Sehingga peristiwa ini membuat Masyumi kehilangan anggota yang merupakan organisasi terbesar dan paling mewakili muslim tradisional.¹⁴

Ada banyak ulasan mengenai penarikan diri NU ini, namun hanya sedikit yang memberikan analisis ilmiah mengenai penyebabnya. Misalnya, bahwa NU kehilangan posisi Menteri Agama dan berkurangnya peran ulama dalam pengambilan keputusan politik Masyumi, terdapat pembagian kekuasaan di antara kaum tradisional dan modernis yang tidak merata. Kekecewaan terhadap persoalan distribusi kekuasaan, tiga kali pembagian kursi kabinet NU mendapat satu jatah yaitu di menteri agama. Hal itu dapat dimaklumi karena NU memang miskin tenaga ahli yang terampil dalam memimpin suatu kementerian dan menteri agama yang dapat diandalkan. Karena NU merasa dalam hal itu maka dalam kabinet Wilopo tahun 1952 Numenghendaki agar kursi menteri agama tetap menjadi bagianya.

Keterlibatan NU secara organisatoris dalam pentas politik dimulai tahun 1952. Pada saat itu, NU menyatakan keluar dari Masyumi dan menegaskan dirinya sebagai partai politik. Mulai saat itu sebutan “Partai NU” lebih populer karena keterlibatannya secara langsung dalam kegiatan-kegiatan dan proses-proses politik, disamping masih tetap melakukan kegiatan keagamaan. Berubahnya NU yang semula sebagai organisasi keagamaan menjadi organisasi politik ternyata tidak selamanya menguntungkan. Fungsi utama NU sebagai pengayom umat berubah paradigma yang berorientasi pada politik. Sehingga peran keagamaannya benar-benar telah ditinggalkan. Hal ini dilakukan sampai pada masa Orde Baru.¹⁵

Nahdlatul Ulama beralih sebagai partai politik pada tahun 1952. Adanya dua Cabang di Banyuwangi yaitu NU Banyuwangi dan NU Blambangan ini sering melakukan kegiatan bersama meski Dewan Partai di masing-masing Cabang NU tetap ada. Kedua Cabang ini harus tetap satu suara dalam menentukan sikap politik, sebagaimana telah di atur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama yang berbunyi:

“Dalam suatu daerah Swantara tingkat II, dimana karena keadaannya diperlukan lebih dari satu Tjabang, maka dalam menetapkan beleid politiknya haruslah hanya ada satu matjam kebidjaksanaan. Pengurus Besar atas usul Pengurus Wilajah yang bersangkutan menetapkan pembagian daerah untuk masing-masing Tjabang di atas”.

¹⁴ Fealy. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2003), hlm. 93.

¹⁵ Tutik. *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), hlm. 8-9.

Aturan diatas akhirnya membuat Cabang NU Banyuwangi dan Blambangan bekerja sama untuk membesarkan Partai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa hal penting diadakan konferensi bersama membahas tentang kepartaian di antara kedua Cabang tersebut.

Kiprah politik dari Cabang Banyuwangi dan Blambangan juga terlihat saat pengajuan calon yang diusung dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu) pusat. Seperti halnya pemilu 1955, keduanya mengajukan calon untuk dipilih sebagai anggota DPR dan anggota Konstituante. Para calon tersebut juga merupakan representasi dari Banyuwangi, bukan lagi dari cabang masing-masing. Pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung pada 29 September 1955, kedua Cabang NU Banyuwangi juga mengusulkan nama-nama untuk menduduki jabatan anggota dewan. Nama-nama yang diusulkan oleh kedua Cabang tersebut adalah Mahfud Sjamsulhadi (Cabang Banyuwangi), M.S Achjat (Cabang Blambangan), Ahmad Rosjad Mastur (Cabang Banyuwangi), dan Mukhodo Pranotodiharjo (Cabang Blambangan).

Tabel 1. Hasil Pemungutan Suara 4 Partai Besar Pemenang Pemilu di Banyuwangi tanggal 8 Oktober 1955

Partai	Hasil Suara	Perolehan Kursi
Partai Nahdlatul Ulama (NU)	160.989 Suara	11 Kursi
Partai Komunis Indonesia (PKI)	130.438 Suara	9 Kursi
Partai Nasional Indonesia (PNI)	80.696 Suara	7 Kursi
Masyumi	31.927 Suara	3 Kursi

Sumber: PCNU Kabupaten Banyuwangi

Sedangkan para calon anggota konstituante yang pemilihannya dilaksanakan 15 Desember 1955 adalah KH. Harun (Banyuwangi) Kiai Dimiyati/ Muhibut Thobari (Blambangan) dan Haji Ahmad Noerhariri (Blambangan). Pada pemilihan tersebut tidak ada satupun calon yang lolos sebagai anggota DPR. Adapun di keanggotaan Konstituante hanya KH. Hadi Harun saja yang lolos. Namun, terlepas dari hal itu Partai NU mampu menorehkan kemenangan di Banyuwangi.¹⁶

Masing-masing kekuatan politik yang berada di dalam DPRD Banyuwangi, mulai melakukan konsolidasi untuk menyusun kekuatan guna mengusung calonnya. Saat itu, Partai NU mempersiapkan dua nama untuk di ajukan sebagai Bupati Banyuwangi. Calon pertama adalah Muhammad Khusnu berprofesi sebagai dosen hukum. Sementara calon yang kedua adalah Hafid Suroso, yang berprofesi sebagai pegawai Departemen Agama. Untuk mempermudah agenda memenangkan jabatan untuk bupati Banyuwangi, NU mulai menjalin koalisi politik dengan PNI Banyuwangi. Ketua PNI Banyuwangi pada saat itu adalah Djafar Ma'ruf ia memulai berkomunikasi secara intens dengan partai NU Cabang Banyuwangi dan juga NU Cabang Blambangan.

Komunikasi dan konsolidasi politik ini dipertahankan oleh sejumlah golongan NU dan PNI di wilayah kabupaten. Namun, komunikasi yang dilakukan oleh Djafar Makruf itu dilakukan

¹⁶ Hendratha. *Angklung Tabung Musik* Blambangan (Banyuwangi: Sengker Kuwung Blambangan, 2021), hlm. 136.

secara individu tidak secara organisir. PNI Banyuwangi kemudian mengusung Djoko Supaat Slamet untuk menjadi bupati. Saat itu, Djoko Supaat Slamet menjabat sebagai Komandan Kodim 0825 Banyuwangi. Usulan dari Djafar Ma'ruf ini kemudian mendapat perlawanan politis oleh kawan sejawatnya di PNI Banyuwangi.

Kabar keputusan dari PNI yang mengusung calon tunggal dari partai tersebut ahirnya sampai ke partai NU. Ahirnya menyebabkan kerja sama antara PNI dan NU ini berahir. NU Cabang Banyuwangi kemudian mengusung Suwarso Kanapi yang berprofesi kepala jaksa di Banyuwangi, perhitungan pengusungan ini didasarkan atas kalkulasi politik. Suwarso Kanapi memiliki wibawa yang cukup tinggi untuk memenangkan pertarungan di perlemen. Dengan mengusung Suwarso Kanapi, sudah dipastikan akan mendapat dukungan dari partai lain, seperti PKI dan Pertindo. Meski demikian, kalkulasi politik yang diambil oleh NU, juga mempertimbangkan sisi keagamaan yang tak mungkin ditinggalkan dalam keputusan politik yang diambil.

Namun langkah politik yang diusulkan oleh NU Cabang Banyuwangi ini tidak melibatkan NU Cabang Blambangan. Sehingga hal ini membuat Abdul Latif selaku ketua dari NU Cabang Blambangan segera membangun komunikasi politik dengan Djakfar Makruf (Ketua PNI Banyuwangi). Keduanya bersepakat untuk mengusulkan Djoko Supaat Slamet. Dari sinilah perseteruan antara NU Cabang Banyuwangi dan NU Cabang Blambangan mulai memanas.

NU yang terbagi dalam kepengurusan NU Cabang Banyuwangi dan NU Cabang Blambangan ini terbagi menjadi 2 kubu. Kubu Ali Mansur (NU Cabang Banyuwangi) mendukung pelantikan Suwarso Kanapi, sedangkan kubu Abdul Latief (NU Cabang Blambangan) menolaknya. Perseteruan internal antara NU yang ada di Banyuwangi, mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Presiden Sukarno memerintahkan kepada Wakil Perdana Menteri Subandrio untuk menangani gejolak di Banyuwangi. Dalam "*Kisah Politisi Radikal*" disebutkan jika Soekarno juga berkirim surat kepada KH. Muhammad Dachlan selaku ketua PBNU. Dalam surat tersebut Soekarno meminta agar PBNU memanggil anggotanya yang melakukan penolakan terhadap pelantikan Suwarso Kanapi. Saat itu, yang di panggil adalah Abdul Latief Sudjak.¹⁷ Subandrio kemudian melakukan mediasi dengan mempertemukan para pendukung golongan PNI dan NU baik dari Cabang Banyuwangi dan Cabang Blambangan di Surabaya untuk bermusyawarah. Dari pertemuan ini menghasilkan sebuah solusi yaitu untuk mempercepat pelantikan Suwarso Kanapi calon Bupati Banyuwangi. Hal ini juga dilakukan di internal NU untuk mendamaikan kedua kubu antara Ali Mansur dan Abdul Latief.

Pada 29 Desember 1964, pertama kali berlangsung aksi demonstrasi menolak terpilihnya Suwarso Kanapi sebagai Bupati Banyuwangi. aksi di penghujung tahun itu berlangsung di Pendopo Banyuwangi dengan melibatkan sepuluh ribu massa. Yang terdiri dari Marhenis (PNI) yang dipimpin oleh Dja'far Makruf dan kalangan agama (NU) yang dikomando Abdul Latief. Pada saat itu di pendopo sedang digelar Komando Cacar. Para demonstran menuntut empat hal kepada pemerintah (Panca Tunggal). Empat yang dituntut yang diajukan oleh demonstran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak bisa menerima dan menolak kedatangan Bupati daerah yang baru Suwarso, SH. PNI dan NU tidak bisa mempercayai pengangkatan kepala daerah yang baru.

¹⁷ Notonegoro. *Manunggaling NU Ujung Timur Jawa* (Banyuwangi: Batari Pustaka, 2021), hlm. 59.

2. Mendesak kepada Panca Tunggal untuk mengambil tindakan yang tegas kepada manipulasi naiknya barang dan minta disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
3. Jalankan intruksi pemerintah No. 9/64 tentang retuling aperatur negara, untuk kepala daerah, anggota BPH, DPR yang tersangkut partai terlarang.
4. Hukum segera Basuki Cs dari desa Olehan, Banyuwangi yang sedang sengaja menghina agama secara keji terhadap agama Islam karena negara kita berdasarkan ketuhanan YME dan berlandaskan Pancasila.

Setelah melakukan mediasi akhirnya dua kubu tersebut bermufakat untuk menerimanya. Pada 26 Agustus 1965 bertempat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, pelantikan tersebut digelar dalam rangkaian sidang DPR GR Tk. II Banyuwangi. Pelantikan Bupati Banyuwangi Suwarso Kanapi yang baru satu bulan tersebut kembali menghadapi dinamika politik yang dahsyat. Namun, Suwarso Kanapi menjabat sebagai bupati Banyuwangi tidak bertahan lama yaitu sekitar 6 bulan. Hal ini dikarenakan Suwarso Kanapi terlibat dalam peristiwa gerakan kontra revolusi 30 September dan dipecat oleh Pemerintah dalam Negeri yaitu Madjen Dr Sumarno.¹⁸

Bersamaan dengan meletusnya aksi Gerakan 30 September tersebut, para elit politik di Banyuwangi mendirikan Badan Koordinasi Komando Siaga (BKKS) Banyuwangi yang dipimpin oleh Abdul Latief Sudjak. Tujuan didirikan BKKS ini untuk mengendalikan tindakan dari massa non komunis terhadap lawan mereka, yaitu PKI. Pada 30 Oktober 1965, BKKS ini kemudian berubah menjadi Badan Komando Siaga (BKS) yang berfungsi untuk membantu ABRI untuk menumpas G30S dan memelihara ketertiban di Banyuwangi. BKS ini diikuti oleh sejumlah orpol (organisasi politik) dan ormas non-komunis seperti NU, PNI, Katolik, Protestan, Perti, Muhammadiyah dan Al-Irsyad.¹⁹

Kesimpulan

Nahdlatul Ulama beralih sebagai partai politik pada 1952. Di Banyuwangi dua Cabang yaitu NU Banyuwangi dan NU Blambangan ini sering melakukan kegiatan bersama meski Dewan Partai di masing-masing Cabang NU tetap ada. Kedua Cabang ini harus tetap satu suara dalam menentukan sikap politik, sebagaimana telah di atur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama. NU yang terbagi dalam kepengurusan NU Cabang Banyuwangi dan NU Cabang Blambangan ini terbagi menjadi dua kubu. Kubu Ali Mansur (NU Cabang Banyuwangi) mendukung pelantikan Suwarso Kanapi, sedangkan kubu Abdul Latief (NU Cabang Blambangan) menolaknya. Sampai akhirnya yang terpilih menjadi bupati Banyuwangi adalah Suwarso Kanapi, namun tidak berselang lama Suwarso dipecat karena terlibat dalam PKI.

Referensi

- As'adi, A. 2010. *Biografi KH. Dimiyati As-syafi'i: Kyai Muda Sang Pejuang Kemerdekaan*. Banyuwangi: PP. Nahdlatut Thullab
- Fealy, G. 2003. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang

¹⁸ Kompas, *Lima Bupati di Pecat* 30 Oktober 1965.

¹⁹ Kompas, *Badan Komando Siaga Banyuwangi* 30 Oktober 1965.

Dinamika Nahdlatul Ulama Cabang Blambangan pada Tahun 1944-1966

Muhammad Wahyudi, Fara Sari Nur Bayani, Akhmad Ryan Pratama, Kayan Swastika

Hendratha, E. 2021. *Angklung Tabung Musik Blambangan*. Banyuwangi: Sengker Kuwung Blambangan

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Mahanani, Qisthi Faradina Ilma, Mega Alif Marintan, Irma Ayu Kartika Dewi, and Moh. Ashif Fuadi. "ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA (Perspektif Sejarah)." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 3, no. 1 (2022): 62–69.
<https://doi.org/10.22515/isnad.v3i1.5395>

Kompas, *Lima Bupati di Pecat* 30 Oktober 1965

Kompas, *Badan Komando Siaga Banyuwangi* 30 Oktober 1965

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Laporan Sumbangan Muktamar NU ke 22 Tahun 1959

Muzadi, A. M. 2006. *Mengenal Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista

Muzadi, A. M. 2006. *NU Dalam Prespektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya: Khalista

Notonegoro, A. 2021. *Manunggaling NU Ujung Timur Jawa*. Banyuwangi: Batari Pustaka

Tim PCNU Banyuwangi. 2016. *Sejarah Nahdlatul Ulama Banyuwangi*. Banyuwangi: PCNU

Tutik, T, T. 2008. *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lintas Pustaka

Wafirudin, A. 2010. *Biografi KH. Dimiyati Asy Syafi'i: Kyai Muda Sang Pejuang Kemerdekaan*. Banyuwangi